

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran daerah sebagai instrumen perencanaan keuangan daerah seharusnya dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, perumusan APBD perlu mengacu pada sasaran kinerja yang spesifik dan terukur. (Pratama, Agustin, dan Taqwa 2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun secara bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD berfungsi sebagai instrumen untuk mengalokasikan sumber daya guna memenuhi kebutuhan publik yang beragam. Proses penyusunan APBD harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan rencana yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat (Hendra Karianga, 2023).

Penyusunan anggaran yang efektif menuntut sinergi antara pimpinan dan seluruh staf dalam suatu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Anggaran yang dihasilkan melalui partisipasi ini kemudian disahkan oleh pimpinan SKPD. Berdasarkan peraturan daerah, pimpinan SKPD membentuk struktur organisasi yang terdiri atas bidang dan seksi, masing-masing bertanggung jawab atas urusan tertentu. Dalam konteks ini, akuntansi pertanggungjawaban berperan krusial dalam mengukur kinerja dan hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan anggaran (Resi, Thalib, dan Soleiman 2021).

Partisipasi dalam penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban juga diyakini mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi karyawan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama diantara manajer maka, manusia harus menumbuhkan motivasi kerja setinggi-tingginya bagi para karyawan dalam organisasi. Jadi dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan motivasi kinerja pegawai akan meningkat

karena komunikasi antara bawahan dengan atasan dalam membuat keputusan bersama dalam bekerja (Lisha, 2023).

Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kabupaten Cirebon yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah atau yang disingkat BKAD Kabupaten Cirebon dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan pada anggaran yang dialokasikan pada periode sebelumnya. Proses perencanaan anggaran per kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon dipimpin oleh kepala bagian atau sub-bidang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab utama.

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang telah dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja manajerial dalam suatu organisasi, beberapa faktor tersebut meliputi partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan motivasi kerja. Partisipasi pegawai dalam proses penyusunan anggaran dapat menunjang tercapainya kinerja manajerial dalam suatu organisasi. Karena proses penyusunan anggaran dilakukan oleh masing-masing sektor atau bagian berdasarkan target kegiatan yang ingin direalisasikan atau berdasarkan realisasi program kegiatan pada tahun sebelumnya (Rahmawati et al., 2017).

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban jika dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kinerja manajerial. Akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi digunakan sebagai alat pengendalian manajemen mengenai penilaian kinerja, yaitu dengan membandingkan target dan realisasi yang telah dijalankan, sehingga manajer pada setiap pusat pertanggungjawaban dapat mempertanggungjawabkan apapun yang dapat dikendalikannya. (Riharjo, 2020).

Motivasi kerja adalah faktor penting yang memengaruhi kinerja karyawan dan manajerial. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inisiatif karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa sistem penghargaan yang adil dan pengakuan atas pencapaian kinerja dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan (Kentjana dan Nainggolan 2018).

Permasalahan anggaran merupakan permasalahan yang sering terjadi. Hal ini terlihat dari aspek perencanaan keuangan dan program kegiatan, pengalokasian anggaran instansi/satuan kerja masih belum wajar, efisien, dan sejalan dengan pendapatan/belanja yang direncanakan, hal ini berdampak pada tidak lancarnya pelaksanaan kegiatan (djpb.Kemenkeu.go.id). Target dan Realisasi Belanja s.d. triwulan II Tahun Anggaran 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon realisasinya hanya mencapai Rp.6.610.273.682 dari total belanja yang ditargetkan sebesar Rp.17.183.528.620 dengan persentase sebesar 52% (*sumber: rencana kerja perubahan BKAD tahun 2022*). Artinya realisasi belanja belum memenuhi target yang diharapkan. Peningkatan dan penurunan yang tidak proporsional juga terjadi pada persentase realisasi capaian kinerja badan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Cirebon. Jadi dapat dikatakan partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran masih belum maksimal dan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan belum maksimal. Kurangnya keterlibatan dan partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran mengakibatkan kurangnya motivasi bekerja, hal ini terlihat dari target dan realisasi anggaran yang masih belum optimal. Akuntansi pertanggungjawaban mempunyai peranan penting yaitu sebagai alat ukur untuk menilai capaian kinerja manajerial berdasarkan laporan pertanggungjawaban perencanaan anggaran yang kemudian dibandingkan dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peran serta penyusunan anggaran dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang baik dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kinerja manajer sebagai pengambil keputusan dalam organisasi. (Siahaan, 2020).

Penelitian ini dilakukan karena terdapat inkonsistensi penelitian sebelumnya dimana menurut (Cahyani, 2019) mengungkapkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja. Namun hal ini tidak selaras dengan (Dwipayanti dan Astika, 2013) mengungkapkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban tidak efektif untuk menilai kinerja, hal ini dikarenakan meskipun telah memenuhi kriteria akuntansi pertanggungjawaban namun kinerja perusahaan masih dikatakan belum cukup baik karena realisasi biaya masih di bawah anggaran.

Berdasarkan referensi terdapat beberapa penelitian yang tidak selaras dengan penelitian lainnya. Dalam penelitian (Meirina dan Aziora, 2020) tentang partisipasi anggaran terhadap kinerja disebutkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal ini diperkuat dengan penelitian (Setiawan dan Rohani, 2019) yang menyatakan partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Namun penelitian (Ermawati, 2017) menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Dalam penelitian (Resi, Thalib, dan Soleiman 2021) menyatakan variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Motivasi merupakan hasil dari sejumlah proses internal dan eksternal pada diri seorang individu, yang menyebabkan timbulnya keinginan dan beberapa faktor pendukung dalam melakukan aktivitas tertentu. Dengan mempunyai motivasi yang tinggi maka dapat meningkatkan kinerja manajerial. Sedangkan menurut penelitian (Hidayat, 2021) menyatakan bahwa variabel motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Artinya motivasi kerja tidak dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kurangnya penghargaan berupa pujian ataupun bonus dari atasan kepada bawahannya dapat mengakibatkan rendahnya motivasi karyawan dalam bekerja.

Berdasarkan *gap analysis* diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Manajerial pada BKAD Kabupaten Cirebon”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah terkait dengan kinerja manajerial Badan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon diantaranya:

1. Belum optimalnya keikutsertaan dan koordinasi pegawai dalam penyusunan suatu anggaran telah menjadi perhatian utama dalam organisasi, di mana kurangnya sinergi dan kolaborasi di antara anggota tim menyebabkan hasil anggaran yang kurang memuaskan.

2. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang belum mencapai tingkat optimal di dalam instansi menjadikan hambatan dalam evaluasi kinerja organisasi.
3. Kurangnya keterlibatan dan partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran tidak hanya berdampak pada proses anggaran itu sendiri, tetapi juga telah menciptakan kurangnya motivasi bekerja di kalangan karyawan.
4. Meskipun terdapat berbagai penelitian terdahulu, namun masih terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian yang telah dilakukan. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat menciptakan ketidakpastian dalam mengambil keputusan kebijakan.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial?
2. Apakah akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial?
3. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial?
4. Apakah partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.
2. Untuk menganalisis pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial.
3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja manajerial.
4. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan motivasi kerja terhadap kinerja manajerial.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam konteks penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk publikasi ilmiah yang berkualitas.

2. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam mata kuliah akuntansi manajemen, sehingga mahasiswa dapat memahami secara mendalam konsep dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam dunia bisnis.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan dalam merancang dan menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai tujuan strategisnya.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan motivasi kerja terhadap kinerja manajerial pada organisasi sektor publik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menyajikan secara sistematis gambaran umum penelitian yang telah dilakukan.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memberikan gambaran umum tentang permasalahan penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini berisi uraian dari teori-teori yang digunakan peneliti untuk membahas masalah yang meliputi teori Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban, Motivasi Kerja dan Kinerja Manajerial. Pembahasan mengenai *Literatur review* atau penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini menyajikan rancangan penelitian yang komprehensif, mencakup seluruh aspek metodologi yang diperlukan untuk menjawab hipotesis yang diajukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini menyajikan temuan-temuan penelitian yang diperoleh dari analisis data.

BAB V PENUTUP, dalam bab terakhir berisi hasil penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh.

